

### **SURAT TUGAS**

Nomor: ST/ 694 /X/2019/UBJ

Pertimbangan : Sehubungan dengan Undangan Pelaksanaan Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Pidana, dipandang perlu menugaskan Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Untuk itu perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar

- : 1. Surat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 0077/UN9.FH/TU.UN/2019, tanggal 31 Juli 2019 perihal Undangan Konferensi Nasional Hukum Pidana.
  - 2. Nota Dinas Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: ND/420/X/2019/FH, tanggal 3 Oktober 2019 perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Dosen dan Fasilitas terkait untuk Acara Call of Papers Konferensi Nasional Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya a.n. Dr. Amalia Syauket, SH, M.Si dan Nina Zainab, SH, MH.

### DITUGASKAN

Kepada

- 1. Dr. AMALIA SYAUKET, SH, M.Si DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- 2. NINA ZAINAB, SH, MH DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

Untuk

: 1. Mengikuti kegiatan Konferensi Nasional Hukum Pidana sebagai Pemakalah dan Peserta, yang diselenggarakan pada:

: Rabu - Kamis Hari

Tanggal : 30 - 31 Oktober 2019

Tempat : FH Tower Lt. 8, Universitas Sriwijaya Palembang

Jl. Palembang – Prabumulih KM.32, Inderalaya,

Kabupaten Ogan Ilir 30662

- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Bekasi

Pada Tanggal

23 Oktober

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M. INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

Tembusan:

Para Wafek UBJ

2. Dekan FH UBJ 3. Ka. BAU UBJ

4. Ka. BPAK UBJ



ISBN:978-979-587-840-7 \$9789795 87-8407

EDITOR:

RIZKA NURLIYANTIKA, SH., LL.M - VERA NOVIANTI, S.H., M.HUM NEISA ANGRUM ADISTI, S.H., M.H - ISMA NURILLAH, S.H., M.H LUSI APRIYANI, S.H., LL.M

### **PROSIDING**

### KONFERENSI NASIONAL HUKUM PIDANA 2019

TELAAH KRITIS KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PIDANA DI BIDANG PEREKONOMIAN

PALEMBANG, 30 - 31 OKTOBER 2019



### **PANITIA PELAKSANA**

PENANGGUNG JAWAB

: DR. FEBRIAN, S.H., M.S

PENGARAH

: DR. MADA APRIANDI, S.H., MCL

DR. RIDWAN, S.H., M. HUM

DRS. H. MURZAL, S.H., M.HUM

MODERATOR

: DR. H. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H

RD. MUHAMMAD IKHSAN, S.H., M.H

DR. HENNY YUNINGSIH, S.H., M.H

KETUA PANITIA

: DR. HJ. NASHRIANA, S.H., M.HUM

**SEKERTARIS** 

: NEISA ANGRUM ADISTI, S.H.,MH

BENDAHARA

: LUSI APRIYANI, S.H.,LL.M

ACARA

: DR. H. SYARIFUDDIN PETTA NASSE, S.H., M.H

SURATMAN, S.H., M.H

VERA NOVIANTI, S.H., M.HUM

MAHESA RANNIE, S.H., M.H.

ISMA NURILLAH, S.H., M.H

TAROMAN PASYAH, S.HI.,M.H

TASLIM, S.H., M.H.

YANUAR SYAM PUTRA, S.H., M.H

### REVIEWER:

DR. HJ. NASHRIANA, S.H., M.HUM

DR. HJ. ANNALISA Y, S.H., M.HUM

DR. HENNY YUNINGSIH, S.H., M.H

DR.IZA RUMESTEN RS SH,MH

### EDITOR:

RIZKA NURLIYANTIKA, S.H., LL.M.

VERA NOVIANTI, S.H., M.HUM

NEISA ANGRUM ADISTI, S.H.,M.H

ISMA NURILLAH, S.H., M.H

LUSI APRIYANI, S.H.,LL.M

### DAFTAR ISI

GUGATAN PERDATA GUNA MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT DIKABULKANNYA PERMOHONAN KASASI SYAFRUDIN ARSYAD TEMENGGUNG, TERDAKWA PERKARA KORUPSI PENGHAPUSAN PIUTANG BANTUAN LANGSUNG BANK INDONESIA (BLBI) TERHADAP BANK DAGANG NEGARA
INDONESIA (BDNI)
PRIYAMBUDI, S.H., M.H.
MODEL OF PROGRESSIVE LAW ENFORCEMENT IN REIMBURSING STATE LOSSES THROUGH CRIMINAL SUBSTITUTE MONEY
Nandang Sambas dan Ade Mahmud
PENGUASAAN UANG SEBAGAI BENDA BERGERAK DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Arfiana Novera, Amrullah Arpan
TERGERUSNYA DROIT DE PREFERENCE (ASAS PRIORITAS) KREDITOR, KETIKA DEBITOR TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI
Habib Adjie
POLICY AND CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS S OF CORRUPTION: REORIENTATION OBJECTIVE OF CONDEMNATION
HAMBALI YUSUF, S.H., M.HUM
RESTORING THE INDEPENDECE OF JUDGES FROM JUDICIAL CORRUPTION CRIME 49
Slamet Haryadi, Ibrahim Fikma Al Edrisy, Kamilatun
DILEMATIK PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM KASUS KORUPSI
RENY OKPIRIANTI, SH. M.HUM
CRIMINAL LAW POLICY FORMULATION ASSET DEPRIVATION OF CRIMINAL ACTION RESULT
Sri Ismawati dan Slamet Rahardjo
The Distortion on Law Enforcement in The Financial Services Sector (The Case of Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur)
Kukuh Komandoko
Analisis Ekonomi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan MA Nomor No. 1555/K/PID.SUS/2019 tentang Korupsi BLBI)
Isman

CRIMINAL LAW POLICY ABOUT MONETARY SANCTION IN THE BILL OF PENAL CODE OF
INDONESIA
Yoserwan, Elwi Danil, Iwan Kurniawan
TRANSPARANCY AND ACCOUNTABILITY POLITICAL PARTY FUND ASSISTANCE FROM THE
CORRUPTION CRIMINAL PERFECTIVE
ARIA ZURNETTI - NANI MULYATI - RIKI AFRIZAL
Model Ganti Kerugian bagi Korban Penipuan Pasar Modal
Ainul Azizah, Prof. Much. Zaidun , SH, M.S, Dr.Mas Rahmah, SH,MH, L.LM
MODEL PERLINDUNGAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI
SUMATERA BARAT
Efren Nova , Yandriza
Penal Mediation and Confiscation of Asset; Efforts to Give Restitution for Victims of Trafficking in Persons
Ika Dewi Sartika Saimima, <sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora, <sup>2</sup> Widya Romasindah Aidy <sup>3</sup>
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PENGUSUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA
Riki Afrizal
EFFECTIVENESS OF THE COORDINATION FUNCTION AND SUPERVISION OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION AS A TRIGGER MECHANISM INVESTIGATION CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS IN THE REGION
Dr. Setya Wahyudi, S.H.,M.H.
PROBLEMATIKA KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Tian Terina, Rendy Renaldy
PEMANFAATAN SARANA PERBANKAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DR. JANURI, S.PD., S.H., M.H.
TINJAUAN TERHADAP UNDANGAN KLARIFIKASI OLEH POLRI PADA KASUS PIDANA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
Yuli Purwanti, S.H., M.H, Fathur Rachman, S.H., MH
Social Permissive Reasoning as Inherited Poverty (Critical view of a Political Dynasty  Prone to Corruption)
Amalia Svauket Nina Zainah

Pertanggungjawaban Pidana "Beneficial Owner" Terhadap Tindak Pidana Korporasi d Bidang Lingkungan Hidup218	
Septa Candra	
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA: DAPATKAH MENGGUNAKAN DEFERRE PROSECUTION AGREEMENT?	D
Febby Mutiara Nelson	
PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM UPAYA PENGEMBALIAN ASET NEGARA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI	
PETRUS RICHARD SIANTURI	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SMARTPHONE DARI PENIPUAN (FRAUD) IKLAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY	)
260	
Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., C.L.A.	
KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI 273	
Dr. Budiyono, S.H., M.Hum	
PENERAPAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DAN PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA INDONESIA TERKAIT PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI 278	
Dr. Derry Angling Kesuma. SH., M. Hum Dr. H. Yuli Asmara Triputra. SH., M. Hum	
FACTORS CAUSING CRIMINAL MEASURES IN HOUSEHOLD (KDRT) TOWARDS WOMEN AN EFFECTS OF TREATMENT THROUGH TRADITIONAL LAW APPROACHES AND LOCAL ATTRACTION IN WEST SUMATERA	D
ARIA ZURNETTI, NANI MULYATI, RIKI AFRIZAL, ABDUL KARIM	
KONSEP HUKUM SUMBER DANA DARI NASABAH PENYIMPAN PADA BANK BUKU I DI	
INDONESIA DALAM MENGHINDARI MONEY LAUNDRY	
Abdul Latif Mahfuz	
HAKIKAT PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA; SEBUAH PENGHUKUMAN BUAT PELAKU ATAU PEMULIHAN BAGI KORBAN?	
Rena Yulia	1
PERSPEKTIF RE-KONSEPTUALISASI PEMIDANAAN DALAM MONEY LAUNDERING DI INDONESIA	
Artha Febriansyah, S.H., M.H., Amsori, S.H., M.H., M.M.	
Asset Recovery in the Criminal Act of Corruption in ASEAN	,
Ripaldy Amrullah Rudi Natamiharia	

### SOCIAL PERMISSIVE REASONING AS INHERITED POVERTY (CRITICAL VIEW OF A POLITICAL DYNASTY PRONE TO CORRUPTION)

### AMALIA SYAUKET<sup>1</sup>, NINA ZAINAB<sup>2</sup>

<sup>1</sup>amalia.syauket63@gmail.com, <sup>2</sup>nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id Fakultas Hukum,Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

### Abstract

Political Dynasty and Corruption are like two inseparable things. In Indonesia, political dynasty has been growing since the era of reformation, right after the implementation of regional autonomy system which enables the continuation of local politics succession directly. At 2018 regional election, there were five provinces with candidates from political dynasties such as: Banten, South Sumatera, West Java, East Java, and West Kalimantan.

As a causality relation, corruption is the outcome and permissive behavior is the cause. In the Province of Banten, corruption occurs due to the permissive behavior stemmed socially ad structurally in the society. One of the influence of the permissive behavior towards corruption is the level of education. The lower it is, the higher the level of poverty, thus more permissive they are towards corruption, as well as the society's lack of knowledge about negative effects of political dynasty. The people in Banten seems don't fully acknowledge that political dynasty is degrading the essence of democracy and prone to corruption practice. In 2016, Banten helds sixth position in Indonesia in their level of poverty, and the second lowest in Java. Based on statistical data, until 2017 the amount of people with poverty in the cities and rural areas has increased.

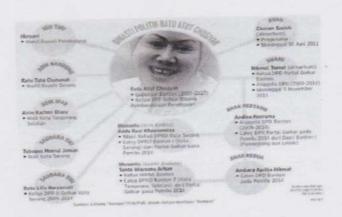
This research used qualitative research method in explanative manner, where the target of this research was to explain the social permissive reasoning phenomenon in the society of Banten as an inherited poverty of a political dynasty which prone to corruption, with several facts that supported data and research analysis which can be used to understand issues derived from such phenomenon.

Keyword: Social Permissive Reasoning, Poverty, and Corruption.

### Background

As a province stone distance from Jakarta, the capital city of Indonesia, the stereotypes of Banten are: being left behind, corruption, political dynasty, poverty, unemployment, damaged schools and infrastructure. Banten is a relatively new province. It used to be a part of the Province of West Java but then established itself since year 2000 by the Law of The Republic of Indonesia Number 23 Year 2000 dated October 17<sup>th</sup>, 2000 with their center of government at the city of Serang. Expansion of Banten from West Java was influenced by lots of stakeholders such as politicians, local bureaucrats, the society, as well as businessmen. From the businessmen side there's a local strongman named Kyai Haji Tubagus Chassan Sochib. Haji Khasan is the father of the ex-governor of Banten; Ratu Atut Chosiyah.

As the phenomenon, the family of Haji Chassan started their governmental journey when Ratu Atut was elected as the Vice Governor of Banten from 2002 to 2007, after that she succeeded to rule as Governor from 2007 to 2012. During her tenure as Governor were the times where her family members went into politics one by one. It is possible that because of her success, her family members were getting into legislative and executive competitions, as well as other public government positions. The graphic are shown below:



Political dynasty and corruption seems to be inseparable pair. According to data collected Indonesian Corruption Watch (ICW), at least there are six political dynasty involved in the circles corruption. First Ratu Atut Choisyiah's dynasty in Banten; second, the dynasty in Kasa Kartanegara. Syaukani Hassan and Rita Widyasari are father and daughter, both were the Regestion Kutai Kertanegara, and were also involved in corruption cases. Third, dynasty in Cimahi, limited and the contract of the contr Tochija and Atty Suharti. Fourth, Fuad Amin's dynasty in Bangkalan, Madura. Fifth, dynasty Klaten conducted by Haryanto family. Sixth, dynasty in Banyuasin. At the regional election badies 2018, there were five candidates in five Province came from political dynasties: Banten, Santan Sumatera, West Java, East Java, and West Kalimantan.

Facts mentioned above approved Jeffrey Winters opinion in his book Oligarchy (2011). He that democracy doesn't automatically erase the practice of oligarchy. On the contrary, in most case democracy is considered as an ideal playing field to spread oligarchy. His concern seems to be seemed as an ideal playing field to spread oligarchy. in the context of local politics in Indonesia after the era of reformation. In Indonesia, politics dynasty has been growing since the reformation era, right after the implementation of regions autonomy system which enables the succession of local politics directly. With capital resource strong social power, several dynasties flourish and take over almost all political institution region.

### Discussion

### A. Social Permissive Reasoning of the Society

In everyday language, social permissive reasoning shapes permissive, ignorant, feeling much tolerant behaviors, and even easily forgives mistakes for the sake of humanity. The doesn't care about all permissive reasoning that thrives between the elites and themselves the point is being permissive about everything.

In a causality relation, corruption is the result and permissive behavior as the cause. In other second corruption occurs as a permissive behavior stemmed socially ad structurally in the Corruption then flourishes and becomes pandemic among a society with growing and seconds permissive behavior. Permissive behavior toward corruption influenced by the level of The lower its, the higher the level of poverty, thus more permissive they are towards common than the level of poverty. (BPS.go.id). Other aspect driving such permissive behavior is a dominant paternal culture of the control of the society. The ignorance of corruptive behavior isn't because of the helplessness of the government institutions, but it's more of a lack of renewal in the society's social structure. about corrupt politician and officials, bribery, love infidelity, first class facilities politicians and official behind bars, all of them is just like an usual news and considered a common thing in the society.

### **3.** Inherited Poverty

society of Banten still don't consider education as important which can be seen by the high school dropouts. Pure Participation Grade (Angka Partisipasi Murni) in a high school or school level is only 57,04%, where the distance between home and school is the main see. In the Regency of Pandeglang, it took 20 kilometers for the students to get to school, meanwhile in Lebak the distance can go up to 25 kilometers, and according to data from Ministry of Culture and Education, there are 48% damaged schools in Banten.

According to Ega Alfreda (published in TRIBUNJAKARTA.COM, Tangerang, January 16<sup>th</sup>, 2016), Banten helds sixth position in Indonesia in their level of poverty, and second lowest in Java. In February 2018, the unemployment rate in Banten is the second largest in Indonesia, when in fact thousands of industries has established in Serang and Tangerang since Banten was declared as Province in October 4<sup>th</sup>, 2000. Open unemployment is highly contributed by junior high school graduates.

The Central Bureau of Statistics in the Province of Banten had released the poverty figures per March 2017. The results showed an increase in the level of poverty to 5,45 % or 17.3 thousand of people with poverty. The increase resulted from the National Economy Social Survey (Susenas) in March 2017. At the previous semester, the level of poverty was around 5,36 % and in March there was a 0,09 % increase or 5,45 %. Besides that, percentage of poor people in the cities and rural areas are increasing as well. In the cities, the amount of poor people increased from 4,49 % to 4,52 %, meanwhile in the rural areas the amount of poor people was 7,32 % in September 2016 and now increased to 7,61 % in March 2017.

There's an increase of 10.9 thousand people in the cities, and 6.4 thousand people in the rural areas, stated the Head of Central Bureau of Statistics in the Province of Banten, Agoes Soebono at the press release on Tuesday, July 18<sup>th</sup>, 2017.

Between September 2016 and March 2017, the Index of Poverty Depth and the Index of Poverty Severity had increased. This indicates the average costs of people living in poverty way lower than the line of poverty and the gap of cost among the poor people has widen as well. The increase of quantity and percentage of the poor people between September 2012 to March 2013 in the cities due to general inflation was quite high, which was 3,8 %. Moreover, the Economy of Banten at the first three months in 2013 was down to 5,76 %, compared with the last three months in 2012, which was 5,92 %.

One of the reasons the continous growing of poverty in Banten is a corrupt political dynasty practice. Political dynasty has stolen the right of the society to enjoy a good health service, decent education service, and also caused the high cost of administration service cost, which is a very basic service for the society. A huge amount of fund to do such basis services, that is the one being corrupted by Ratu Atut's political dynasty in Banten.

The portrait of poverty in Banten is similar to Jeffrey Winter's opinion that the goal of political dynasty is to form power materialism, to lengthen or increase private wealth and social position in the society with any means necessary.

### C. Society of Banten Tends to Tolerate Gratification

A survey conducted by Indonesia Survey Institution (Lembaga Survei Indonesia), between Oct 8<sup>th</sup> – 24<sup>th</sup> 2018, showed that society of Banten still permissive towards corruption. This perceptoccurs due to the frequent bribery practice when dealing with the regional government researcher, Rizka Halida said 46% of people in Banten considered giving in the form of more goods, entertainment service, or gifts to the regional government institution as gratification common practice. It's a very high percentage and it proves their tolerance towards gratification bribery. Their perception towards nepotism regarding public matters with the regional government also increased. Nepotism was considered normal with 17% percentage in 2016, 31% in 2017, and 39% in 2018, and even in 2018, there were 7% of respondents considered nepotism as a commutating.

### D. Political Dynasty and Corruption Issue at 2018 Banten Regional Election

Political Dynasty and Corruption Issue were often heard during 2018 campaign period in Barrell This involved Andika Hazrumy, the eldest son of Ratu Atut Chosiyah, Banten's ex-governor got jailed due to corruption case. Atut's family and relatives are well known for their occupall over Banten. This province, which located in the very west side of Java, always under limelight because of how the political dynasty practice there. Commission of Corruption Eradication (KPK) also include Banten in the list of province with high potential of corruption needs special surveillance.

Results of Banten's election in 2018 showed that society there still consider figure factor as most important rather than issues like corruption and political dynasty. The presence of Appropriate Description of the Political dynasty which was established years and years ago still effective to lengthen their ruling and Banten. With that being said, the political dynasty in Banten is alive until now.

The issue of political dynasty and corruption in Banten is irrelevant due to the conventional thinking of the society. They don't seem to understand completely that political dynasty is a form of abuse in democracy and prone to corruption practice. They don't understand or even care and how their regional leaders got elected, they're happy enough to earn some economical behavior to money politics. According to Saiful Mujani's research, the society of Banten is sopen to money politics. They think it's a common practice and there is nothing wrong with That's why the money politics in there have various forms, such as distributing instant noodless gift, job promotion as civil government officer, and others.

### Conclusion

a. Poverty as the massive impact of corruption. The rise of corrupt political dynasty in Bantes supported by the highly permissive reasoning behavior of the society towards money politics because the society tend to think about themselves and their family. Part of the society that does relate to Ratu Atut's family don't have a firm grip to live their daily life. Their uncertainty of caused by unsolved problems and the lacking sense of community and togetherness nowadays. b. Regarding the applying of Criminal Law. The best optimal treatment for corruptors is increase the explicit cost of corruption. The ideal financial punishment for the corruptors should measure the cost of social corruption by considering the social impact of corruption.

### Reference:

### a. Book

James C. Scott / edited by Mochtar Lubis. Korupsi politik. 1993. Yayasan Obor Indonesia. Peter Burke. Sejarah dan Teori Sosial. 2001. Yayasan Obor Indonesia.

G. P. 2001. Max Weber, Charisma, and the Disenchantment of the World. The Trickster

Reno. Corruption and State Politics in Sierra Leone. 1995.

Pablo. Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines. 2010. Cambridge:

Hidayat. Shadow State, Bisnis dan Politik di Provinsi Banten dalam buku Politik Lokal, Besk Schulte Nordhoh dan Gerry van Klinken. 2007.

A. Winters. Oligarkhi dan Demokrasi di Indonesia, Prisma 1. (January 2014).

### M. Bufographic

jsi.web.id/2013/12/inilah-harta-karun-dan-tahta-dinasti-ratu-atut-chosiyah/ (visited : August 2019, 11:59 Wib)

### = Website

www.tribunnews.com/regional/2013/10/04/wawan-disebut-sebagai-master-mind-dinasti-

(visited : August 10th, 2019, 12:10 WIB)

jogia.tribunnews.com/2013/10/11/pengamat-dinasti-politik-ratu-atut-tak-akan-langsungtvisited: August 10<sup>th</sup>, 2019, 12:17 WIB).

Alfreda (published in TRIBUNJAKARTA.COM, Tangerang, January 16th, 2016).







NOMOR: 399/UN9.1.2/LL/2019

Menerangkan Bahwa:

## **AMALIA SYAUKET**

Atas Partisipasi Sebagai:

### Pemakalah

# KONFERENSI NASIONAL HUKUM PIDANA 2019

' Telaah Kritis Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pidana di Bidang Perekonomian " Palembang, 30 - 31 Oktober 2019

diselenggarakan oleh :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dr. Hj NASHRIANA, SH., M.Hum

Ketua Pelaksana

Dr. FEBRIAN, SH., M.S.

Dekan